

EVALUASI KEBIJAKAN GERAKAN NASIONAL PENINGKATAN PRODUKSI DAN MUTU TANAMAN KAKAO PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SIGI

Purwanto

Dr_ROBOCOP@yahoo.co.id

Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This research aims at describing, the evaluation of policy and It's Development to the Implementation of the National Movement of the Quality of Cacao Plants Improvement at Sigi Regency. This research used a qualitative descriptive method. The data were collected through observations, interviews, and documentations. This seven informants were taken through purposive sampling. The result show that the Evaluation of Policy and It's Development to the Implementation of the National Movement of the Quality of Cacao Plants Improvement at Sigi Regency is still not optimal, It mostly influenced by some factors: 1) effectiveness aspect was still low, 2) efficiency aspect was will low 3) adequacy aspect was low, 4) Equalization aspect was still low, 5) responsiveness aspect was still low 6) Accuracy aspect was good.

Keywords: *Evaluation, Efficiency, Adequacy, Equalization, Responsivity, Accuracy*

Bangsa Indonesia sering juga dikatakan bangsa Agraris, dikarenakan masyarakat Indonesia mayoritas adalah petani. Komoditas pertanian sejak Abad Ke - 17 Mahesi, sudah mampu menyedot perhatian dunia khususnya bangsa Eropa, terutama komoditas rempah – rempah dan buah – buahan. Dalam perkembangannya, komoditas rempah – rempah dan buah – buahan nusantara menjadi sangat menguntungkan bagi para bangsa Eropa, yang akhirnya berdampak pada penguasaan secara sepihak terhadap potensi alam nusantara, yang akhirnya menimbulkan gejolak konflik di berbagai daerah, yang menjadikan bangsa Indonesia selama kurang lebih 350 tahun terjajah secara ekonomi dan secara teritorial.

Kalau pada masa penjajahan tersebut, tanaman yang paling diminati oleh bangsa penjajah adalah rembah – rembah, seperti Pala. Maka di era kemerdekaan ini, Bangsa Indonesia juga memiliki tanaman yang secara ekonomis juga sangat menguntungkan, yaitu tanaman Kakao, selain itu masih banyak lagi seperti Cengkeh. Namun menjadi primadona masyarakat petani yaitu tanaman Kakao tersebut.

Kakao merupakan komoditas andalan perkebunan di Indonesia, karena berperan penting dalam perekonomian Indonesia yaitu sebagai penghasil devisa negara, sumber pendapatan petani, penciptaan lapangan kerja petani, mendorong agribisnis dan agroindustri serta pengembangan wilayah. Selain itu perkebunan Kakao dengan struktur tajuk berstrata dua dan tiga, berfungsi sebagai penyangga kelestarian lingkungan.

Pada umumnya tanaman kakao mulai dikembangkan di Indonesia sekitar tahun 1980 –an, sehingga produktifitasnya sudah menurun dan sudah saatnya dilakukan perbaikan tanaman melalui peremajaan, rehabilitasi, dan intensifikasi. Untuk mengatasi dampak yang semakin memburuk, maka Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian pada tahun 2008 mencanangkan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao (Gernas Kakao). Gernas Kakao merupakan salah satu upaya dalam mempercepat peningkatan produktifitas tanaman dan mutu hasil Kakao nasional dengan mengoptimalkan seluruh potensi pemangku kepentingan dan sumber daya yang ada.

Selain itu, gernas Kakao ditujukan untuk meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan produksi, produktifitas dan mutu hasil.

Dalam penataan perekonomian wilayah, Provinsi Sulawesi Tengah banyak bertumpu pada komoditas hasil pertanian, terutama komoditas kakao. Komoditas Kakao telah dijadikan sebagai “komoditas-citra-unggulan” di wilayah ini, karena selain memberi kontribusi yang besar dalam struktur perekonomian daerah, juga telah berperan sebagai penyedia lapangan kerja bagi sebagian besar penduduk di daerah ini. Luas areal pertanaman Kakao di Propinsi Sulawesi Tengah mencapai 257.313,20 ha dengan total produksi sebesar 168.401 ton biji kering per tahun (Disbun SulTeng, 2013). Kakao dibudidayakan petani dan tersebar di berbagai kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini, salah satunya adalah Kabupaten Sigi.

Berdasarkan uraian diatas, mendorong minat peneliti untuk mengkaji dan menelaah serta untuk mengetahui kebijakan dan keberhasilan Gernas Kakao, peneliti mengambil judul “Evaluasi Kebijakan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi Dan Mutu Tanaman Kakao Pada Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Sigi “. Maka yang menjadi pertanyaan pokok dalam kajian ini adalah : *Bagaimana evaluasi serta perkembangan atas pelaksanaan kebijakan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman (GERNAS) Kakao di Kabupaten Sigi ?* Tujuannya adalah: Untuk Mendeskripsikan evaluasi kebijakan serta perkembangan yang terjadi atas pelaksanaan kebijakan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman (GERNAS) Kakao di Kabupaten Sigi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik akademis maupun praktis sebagai berikut : Manfaat akademis : Memberikan konsep dan pendekatan dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan publik mengenai Gerakan Nasional Peningkatan

Produksi dan Mutu Tanaman (GERNAS) Kakao di Kabupaten Sigi dan Sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi peneliti selanjutnya dalam hubungannya dengan evaluasi Gernas Kakao. Manfaat praktis: Memberikan masukan bagi para perumus dan pelaksana kebijakan pembangunan khususnya di daerah agar bisa dijadikan bahan evaluasi dan kajian terhadap kebijakan yang sedang dilaksanakan demi penyempurnaan di masa datang.

Kebijakan Publik

Ada beberapa teori tentang kebijakan diantaranya yaitu; menurut Edi Suharto (2008) menyatakan bahwa “kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu”. Menurut Samudra Wibawa (1994), bahwa: “Hasil penyaringan tuntutan dan kepentingan dirumuskan sebagai suatu kebijakan”.

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (Rahkmat 2009) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (whatever government choose to do or not to do). Defenisi ini menunjukkan bahwa kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah dan kebijakan publik juga menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan. Segala keputusan yang diambil pemerintah adalah kebijakan, namun tidak mengambil keputusan pun adalah suatu kebijakan.

Jones yang dikutip oleh Rahkmat (2009) mendefenisikan kebijakan publik sebagai prilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada didalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah publik. Pemikiran yang serupa dikemukakan oleh Chander dan Plano (Rahkmat 2009), bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap berbagai sumber daya yang tersedia untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah.

Defenisi lain diungkapkan James E. Anderson (Indiahono 2008), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah perilaku dari sejumlah aktor (penjabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pembicaraan tentang kebijakan memang tidak lepas dari kaitan kepentingan antara kelompok, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat secara umum. Fermana (2009) mengungkapkan, bahwa kebijakan publik adalah studi tentang keputusan dan tindakan pemerintah yang disusun untuk kepentingan publik

Sementara menurut William Dunn (2003) kebijakan publik adalah Pedoman yang berisi nilai-nilai dan norma-norma yang mempunyai kewenangan untuk mendukung tindakan-tindakan pemerintah dalam wilayah yurisdiksinya Kebijakan publik muncul dari adanya permasalahan publik dan kebijakan yang dihasilkan merupakan upaya penyelesaian masalah tersebut.

Namun tidak semua permasalahan menjadi permasalahan publik yang dianggap membutuhkan suatu kebijakan. Lahirnya suatu kebijakan akan melalui suatu proses yang disebut siklus kebijakan publik. Selanjutnya Jones (dalam Wibawa 1994) mengemukakan bahwa Pembuat kebijakan publik adalah para pejabat publik, termaksud para pegawai senior pemerintah (public bureaucrats), yang tugasnya tidak lain adalah memikirkan dan memberikan pelayanan demi kebaikan publik (public good). Dan membagi 2 (dua) sifat yaitu:

1. Sikap aktif adalah pemerintah melakukan tindakan kebijakan berupa larangan atau keharusan melakukan sesuatu.
2. Sikap pasif adalah dicerminkan lewat tiadanya tindakan pemerintah terhadap suatu masalah yang dampaknya bisa membahayakan stabilitas nasional.

Heglo (dalam Abidin 2012) menyebutkan kebijakan sebagai “ *a course of action intended to accomplish some end* “ (Sebagai suatu tindakan yang bermaksud

untuk mencaai tujuan tertentu. Bertolak dari pengertian Heglo, Jones (Abidin 2012) merumuskan kebijakan sebagai perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada di dalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum.

Evaluasi Kebijakan

Penelitian evaluasi, apa pun aspek yang berusaha disoroti, tidaklah pernah berlangsung dalam suasana yang kosong. Ia pada hakikatnya dalah merupakan aktivitas yang berlangsung dalam konteks sosial-politik tertentu. Program dan proyek pembangunan merupakan ciptaan atau produk politik (Weiss dalam Wahab : 2001) dan hasil akhir dari proses negosiasi yang melibatkan sejumlah aktor: para politisi, administrator dan kelompok sasaran (pemetik manfaat) dalam memperjuangkan sumber-sumber langka.

Irawan (2003) mengungkapkan bahwa Evaluasi atau Penilaian adalah suatu rentetan kegiatan yang dilakukan secara teratur dan sistematis, dimulai dari penentuan tujuan, perancangan, pengembangan instrumen, pengumpulan data, dan menafsirkan temuan dengan tujuan untuk menentukan nilai sesuatu dengan cara membandingkannya dengan standar penilaian yang disepakati.

Sehubungan dengan penelitian evaluasi pelaksanaan kebijakan publik, salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yang memang tidak mudah untuk ditangani, serta membutuhkan strategi dan perencanaan yang tepat, dalam upayanya tersebut pemerintah memformulasikan suatu kebijakan melalui program-program pengentasan kemiskinan dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai pelaksana dan obyek. Keseluruhan program yang dilakukan didasarkan pada jumlah masyarakat miskin yang cenderung bertambah.

Anderson (Rusli, 2013:114) secara konseptual kegiatan evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi

atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Artinya kegiatan dievaluasi kebijakan dipandang suatu kegiatan fungsional, dimana kegiatan ini tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan. Untuk sebuah evaluasi kebijakan yang baik harus mempunyai beberapa syarat pokok, antara lain bertujuan menemukan hal-hal yang strategis untuk meningkatkan kinerja kebijakan.

Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Evaluasi sangat berperan dalam nilai-nilai suatu tujuan dan target yang telah ditetapkan. Menurut Nawawi (2006) "Evaluasi kinerja diartikan juga sebagai kegiatan mengukur/menilai pelaksanaan pekerjaan untuk menetapkan sukses atau gagal nya seorang pekerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dibidang kerjanya masing-masing".

Evaluasi kebijakan menurut Samudro Wibawa, (1994) dilakukan untuk mengetahui : 1) proses pembuatan kebijakan; 2) proses implementasi; 3) konsekuensi kebijakan ; 4) efektivitas dampak kebijakan. Evaluasi pada tahap pertama, dapat dilakukan sebelum dan sesudah kebijakan dilaksanakan, kedua evaluasi tersebut evaluasi sumatif dan formatif, evaluasi untuk tahap kedua disebut evaluasi implementasi , evaluasi ketiga dan keempat disebut evaluasi dampak kebijakan.

Wiliam Dunn (1999) menyatakan evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment). adalah Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberikan informasi yang valid mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik, evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai yang

mendasari pemilihan tujuan dan target. Evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Jadi meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik:

Dunn (1999) menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan bahwa :

1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Perataan
5. Responsivitas
6. Ketepatan.

Sehingga Evaluasi Kebijakan Publik adalah proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target atau perbandingan input : output sebagai aspek efisiensi dari kebijakan yang telah ditentukan. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan publik untuk dipertanggung jawabkan kepada publiknya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dibutuhkan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Gerakan Nasional Peningkatan Produksi Dan Mutu Tananam (Gernas) Kakao

Dalam Pedoman Umum 2014, Gernas Kakao adalah upaya percepatan peningkatan produktivitas dan mutu hasil kakao nasional melalui pemberdayaan secara optimal seluruh pemangku kepentingan serta sumberdaya yang tersedia. Dengan Sasaran meliputi perbaikan tanaman kakao rakyat seluas 450.000 ha melalui peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, pemberdayaan petani, pengendalian hama dan penyakit, perbaikan mutu kakao, serta penyediaan sarana pendukung lainnya.

Dalam Buku Pedoman 2014, disebut bahwa Pendekatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao, adalah:

- (1) Gerakan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan yaitu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, perbankan, petani, swasta dengan mengoptimalkan sumberdaya yang ada;
- (2) Lahan merupakan hamparan yang kompak atau berkelompok;
- (3) Pemberdayaan petani dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan;
- (4) Tanaman produktif dengan kondisi rusak sedang dilakukan rehabilitasi dengan cara sambung samping menggunakan klon unggul;
- (5) Bahan tanam (entres), pupuk untuk rehabilitasi, serta sarana pendukung sebagian disediakan oleh Pemerintah;
- (6) Biaya tenaga kerja untuk pelaksanaan di kebun petani menjadi tanggungjawab petani/pekebun, kecuali tenaga kerja penebangan batang utama untuk rehabilitasi, sebagian ditanggung oleh pemerintah;
- (7) Biaya sarana produksi (pupuk, pestisida dan alat pertanian) untuk pemeliharaan tahun ke-2 dan seterusnya memanfaatkan fasilitas kredit Revitalisasi Perkebunan melalui perbankan;
- (8) Peserta Gerakan wajib mengelola kebun sesuai standar teknis dengan bimbingan dari pendamping/ penyuluh/fasilitator dan instansi pembina;
- (9) Petani peserta berdomisili di wilayah Gerakan dan merupakan pemilik kebun.

Adapun Kegiatan Utama Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao meliputi:

- (1) Rehabilitasi tanaman seluas 28.280 ha yang kegiatannya meliputi sambung samping, pemotongan batang utama, penanaman pohon pelindung, pemeliharaan hasil sambungan,

pemupukan dan pengendalian hama penyakit;

- (2) Pemberdayaan petani yang pesertanya berasal dari petani yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi kakao, kegiatannya meliputi pelatihan petani dan pendampingan petani oleh tenaga pendamping;
- (3) Penerapan Standar Mutu yang kegiatannya meliputi penyediaan sarana sosialisasi standar mutu, sosialisasi standar mutu dan penyediaan sarana pasca panen.

Dalam rangka mengawal program Gernas Kakao, dibutuh Tenaga Pendamping dalam pelaksanaan Gerakan di lapangan agar benar - benar sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Tenaga pendamping tersebut adalah Sarjana Pertanian yang berasal dari Perguruan Tinggi setempat dan digunakan dalam Gerakan dengan sistem kontrak, sedangkan rekrutmennya dilakukan oleh Dinas yang membidangi Perkebunan dari masing-masing provinsi, dengan kriteria yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.

Untuk Pembantu Lapang Petugas Tenaga Kontrak Pendamping (PLP-TKP) adalah tenaga kontrak perkebunan lulusan SLTA/Sekolah Kejuruan Pertanian yang direkrut oleh Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pembantu TKP untuk pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao serta tidak menuntut menjadi pegawai negeri Kementerian Pertanian;

Adapun, Petugas pendamping mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan penyuluhan khususnya masalah perkakaoan.
- b. Melakukan pembinaan teknis budidaya kepada para petani peserta Gerakan.

- c. Melakukan penumbuhan dan pembinaan kelembagaan petani.
- d. Menjembatani fungsi instansi/lembaga yang terkait dengan pembiayaan melalui program revitalisasi dengan perbankan.
- e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Gerakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan kepada Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten.

Salah satu konsep yang dikembangkan dalam Gernas Kakao yaitu Pemberdayaan Masyarakat, yang dalam hal ini petani kakao. Pemberdayaan Petani merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola usaha taninya melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap secara bertahap dan berkelanjutan dengan pelatihan dan pendampingan.

Untuk Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao para petani akan dilatih dan ditingkatkan pengetahuannya dalam pengelolaan usaha taninya melalui pelatihan teknis budidaya, pasca panen, peningkatan mutu, kelembagaan, pengelolaan keuangan dan kemitraan usaha.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif berdasarkan pendapat Bogdan & Taylor dalam Andi Prastowo (2012) yang mengartikan dan memahami metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Ulber Silalahi (2009) menyatakan bahwa penelitian Deskriptif menyajikan satu gambar yang terperinci tentang suatu situasi, setting sosial, atau hubungan. Menurut Sugiyono (2005) “ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang di lakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara satu variabel dengan

variabel yang lain : Dalam penelitian ini menggunakan Teknik Purposive dalam Penentuan Informan, yang terdiri dari : Para Pelaksana program; Yaitu a) mereka – mereka yang menjadi implementor program Gernas Kakao Di Kabupaten Sigi . b) Para Pendamping Masyarakat ; Yaitu Tenaga yang direkrut oleh Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Sigi, yang tugasnya menjadi tenaga pendamping masyarakat kelompok sasaran. c) Para Kelompok Sasaran / Petani Kakao ; Yaitu masyarakat yang menerima bantuan Gernas Kakao. Sehingga informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang.

Dalam penelitian ini jenis data yang dibutuhkan ada 2 macam yaitu data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan. Dan data sekunder yaitu merupakan data pendukung dari data primer yang digunakan untuk kepentingan analisis yang diperoleh dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sig serta melalui penelusuran literatur perpustakaan dan dokumen-dokumen.

Analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (Sugiyono, 2012; 91) dengan prosedur pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 1). Pengumpulan Data. Proses awal penelitian yang sering disebut sebagai observasi awal yang berguna dalam memberikan data awal bagi Peneliti. 2) Reduksi Data (pengurangan data). Proses reduksi bertujuan menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasi bahan empirik sehingga dapat diperoleh kategori-kategori tematik. 3). Display data (penyajian data). Setelah data disajikan, karena masih ada data yang kurang maka pengumpulan data dilapangan dilakukan kembali sampai data menjadi lengkap. 4). Menarik kesimpulan/verifikasi. Selanjutnya analisis disusun dan diarahkan pada fokus penelitian untuk disimpulkan dan kesimpulan harus diverifikasi selama penelitian

berlangsung agar memudahkan pada kesimpulan akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara Geografis Kabupaten Sigi terletak antara $0^{\circ} 52' 16''$ LS – $2^{\circ} 03' 21''$ LS dan $119^{\circ} 38' 45''$ BT – $120^{\circ} 21' 24''$ BT dan memiliki wilayah seluas 5.196,02 kilometer persegi terdiri atas 15 kecamatan dimana Kecamatan Kulawi merupakan kecamatan terluas (1.053,56 km²) sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Dolo yang hanya memiliki luas 36,05 km².

Sedangkan Luas wilayah Kabupaten Sigi berbatasan langsung dengan Kabupaten Donggala dan Kota Palu di sebelah Utara, Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan di sebelah Selatan, kemudian Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Donggala di sebelah Barat dan Kabupaten Poso dan Kabupaten Parigi Moutong di sebelah Timur.

Untuk keadaan iklim sebagaimana dengan daerah-daerah lain di Indonesia, Kabupaten Sigi memiliki dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Musim panas terjadi antara bulan April – September, sedangkan musim hujan terjadi pada bulan Oktober – bulan Maret. Hasil pencatatan suhu udara pada Stasiun Udara Mutiara Palu Tahun 2009 bahwa suhu udara rata rata tertinggi terjadi pada bulan September (28,8 °C) dan suhu udara terendah terjadi pada bulan Juli (26,7 °C). Sementara kelembaban udara yang dicatat pada stasiun yang sama berkisar antara 69 – 80 persen. Kelembaban udara rata-rata tertinggi terjadi pada bulan April yang mencapai 80 persen, sedangkan kelembaban udara rata-rata terendah terjadi pada bulan September yaitu 69 persen. Curah hujan tertinggi yang tercatat pada Stasiun Mutiara Palu Tahun 2009 terjadi pada bulan Agustus 199,00 mm², sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Februari yaitu 12,8 mm². Sementara itu kecepatan angin rata-rata berkisar antara 2 –

4 knots. Sama dengan tahun sebelumnya, pada Tahun 2009 arah angin terbanyak datang dari arah Utara sepanjang tahun.

Untuk mengetahui penilaian dari informan terhadap *Evaluasi Pelaksanaan kebijakan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman (GERNAS) Kakao di Kabupaten Sigi*, peneliti telah melakukan wawancara mendalam terhadap 6 defenisi konsep penelitian, yaitu 1) Efektivitas, yaitu sejauh mana proses pelaksanaan berjalan dengan baik. 2) Efisiensi, yaitu sejauh mana tujuan mudah dicapai. 3) Kecukupan, yaitu apakah segala sarana dan prasarana sudah menyukupi. 4) Perataan, yaitu apakah Gernas kakao sudah merata peruntukannya. 5). Responsivitas, yaitu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap program, 6) Ketepatan, yaitu sejauh menyangkut kegunaan program, sesuai dengan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William Dunn (1999:610)

Evaluasi Pelaksanaan kebijakan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman (GERNAS) Kakao di Kabupaten Sigi, dengan melihat 6 indikator diatas, dengan melakukan wawancara melibatkan beberapa informan yang dianggap mengetahui dan mengerti masalah – masalah yang diteliti. Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini terdiri dari : Unsur dari Pimpinan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sigi, Tenaga Pendamping dan Kelompok Tani Kakako.

Setiap informan dilakukan identifikasi untuk mengenal lebih dekat masing – masing informan untuk memahami setiap karakteristik informan, sehingga informasi yang diperoleh bersifat optimal sesuai dengan tingkat kebutuhan peneliti. Peneliti lebih mengfokuskan pada *Evaluasi Pelaksanaan kebijakan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman (GERNAS) Kakao di Kabupaten Sigi*, dengan melihat 6 indikator Evaluasi, yaitu:

Efektifitas

Untuk mengetahui Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Kakao di Kabupaten Sigi dari aspek efektifitas, dapat dilihat bawah ini, yang dikutip dari pendapat informan yang bernama Mukmin Zain yang merupakan Kepala Bidang Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sigi, yang mengemukakan bahwa :

“sebagai instansi pelaksana Gernas di Kabupaten Sigi, kami terus mengalakkan program ini. Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2014 ada 19.700 Hektar lahan potensial tanaman Kakao. Yang menjadi sasaran program Gernas sebanyak 450 Hektar untuk Intensifikasi, 600 Hektar untuk Rehabilitasi dan 900 Hektar untuk Peremajaan. Total yang menjadi sasaran Gernas di Kabupaten Sigi pada tahun 2014 sebanyak 1.950 Hektar, dan kesemuanya sudah kami laksanakan berbagai tindakans sesuai peruntukannya.” (Wawancara, 14 Mei 2015)“.

Hasil wawancara tersebut, menggambarkan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Kakao di Kabupaten Sigi sudah terlaksana sesuai dengan jumlah sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini juga menunjukkan bahwa masih banyak lahan potensial tanaman kakao yang belum terjamah oleh program Gernas di Kabupaten Sigi.

Efesiensi

Untuk mengetahui Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Kakao di Kabupaten Sigi dari aspek efesiensi, dapat dilihat bawah ini, yang dikutip dari pendapat informan yang bernama Sundary, yang merupakan Tenaga Kontrak Pendamping (TKP), mengungkapkan bahwa ; *“dari hasil pemantauan kami, program Gernas ini tidak terlalu sukses pelaksanaannya, karena ada petani yang tidak berhasil tanaman Kakaonya, hal ini*

sebabkan produktifitas tanamannya sedikit, tidak sesuai dengan harapan petani.” (Wawancara, 9 Juni 2015).

Informasi ini menunjukkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Kakao di Kabupaten Sigi belum efisien, walaupun ada yang berhasil produksi tanaman Kakaonya, namun tidak sedikit juga yang tidak berhasil, yang tidak sesuai dengan harapan petani.

Kecukupan

Untuk mengetahui Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Kakao di Kabupaten Sigi dari aspek Kecukupan, dapat dilihat bawah ini, yang dikutip dari pendapat informan yang bernama Isna Silal, salah seorang Tenaga Kontrak Pendamping Gernas, yang menyebutkan bahwa :

“ada berbagai sarana yang telah tersedia selama pelaksanaan program Gernas ini, seperti pupuk, obat-obatan, gergaji pangkas, gunting galla, dan hansprayan. Peralatan – peralatan ini sudah menyukupi untuk kami memulai perawatan tanaman kakao.” (Wawancara, 23 Juli 2015).

Dari wawancara tersebut, dapat digambarkan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Kakao di Kabupaten Sigi dari aspek sarana sudah cukup, karena berbagai sarana pendukung seperti pupuk, obat – obatan, serta gergaji pangkas, gunting galla dan Hansprayer sudah tersedia.

Perataan

Untuk mengetahui Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Kakao di Kabupaten Sigi dari aspek perataan, dapat dilihat bawah ini, yang dikutip dari pendapat informan yang diberikan oleh Tenaga Kontrak Pendamping lainnya

yang bernama Yurike Elviani, yang menyebutkan bahwa:

“kita harus jujur bahwa program ini belum mencapai semua wilayah yang potensial untuk dikembangkan industri tanaman kakao nya. “ (Wawancara, 17 September 2015)

Hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Kakao di Kabupaten Sigi dari aspek perataan belum baik, karena tidak semua wilayah diprogramkan oleh pemerintah, sesuai dengan jatah luas lahan yang diberikan bantuan untuk program Gernas ini.

Responsivitas

Untuk mengetahui Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Kakao di Kabupaten Sigi dari aspek responsivitas, dapat dilihat bawah ini, yang dikutip dari pendapat informan yang bernama Yani selaku anggota kelompok maju sejahtera jaya , yang mengungkapkan:

“saya dan teman – teman senang sekali dengan adanya program Gernas ini, kami jadi semangat dalam mengelolah kebun kami yang kurang produktif ini. “ (Wawancara, 2 Oktober 2015)

Hal ini menunjukkan, bahwa Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Kakao di Kabupaten Sigi dari aspek responsivitas cukup baik, karena petani dalam kelompok tani senang dengan adanya program ini, mereka merasa bersemangat dalam mengelolah kebun kakao mereka lagi.

Ketepatan

Untuk mengetahui Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Kakao di Kabupaten Sigi dari aspek ketepatan, dapat dilihat bawah ini, yang dikutip dari pendapat informan yang bernama Usman selaku Anggota Kelompok Tani

Idaman Rakyat Uerani Palolo , yang mengungkapkan :

“Program Gernas ini sudah tepat sasaran, karena bisa menjangkau masyarakat petani, dan masyarakat bisa meningkatkan pendapatan dari hasil produksi tanaman Kakao ini. ” (Wawancara, 8 Oktober 2015)

Hal ini menunjukkan, bahwa Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Kakao di Kabupaten Sigi dari aspek ketepatan cukup baik, yaitu dari aspek petani sudah merasakan memanfaatkan bantuan dari Program Gernas, yang akhirnya bisa meningkatkan pendapatan petani.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, bahwa: *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Kakao di Kabupaten Sigi belum Optimal*, karena beberapa aspek yang mempengaruhinya, yaitu: 1) aspek Efektifitas masih belum baik, 2) aspek efisiensi masih belum baik, 3) aspek Kecukupan masih belum baik, 4) aspek Perataan masih belum baik, 5) aspek Responsivitas sudah baik, 6) aspek ketepatan sudah baik.

Oleh karena itu penelitian ini menyarankan untuk diperhatikan yaitu Saran Teoritis yaitu 1) Perlunya efektifitas pelaksanaan Gernas di Kabupaten Sigi dalam hal ketepatan waktu pengadaan bibit Kakao. 2) Perlunya pengadaan bibit yang berkualitas, sehingga tidak merugikan Petani. 3) Perlunya pengadaan mesin – mesin traktor untuk menyuburkan tanah dalam penanaman bibit Kakao, 4) perlunya penyebaran bantuan program Gernas di semua Petani Kakao yang ada di Kabupaten Sigi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada Pembimbing yaitu Dr. Awad Souliha, M,Si dan Dr. Abu Tjaiya, M.Si atas segala bimbingan, koreksi dan motivasinya sehingga bisa menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik Edisi 2*. Salemba Humanika. Jakarta.
- AntaraneWS.SulTeng. Petani Kakao di Sigi Beralih Tanam Kopi. Melalui: <http://m.antarasulteng.com/berita/15863/petani-kakao-di-sigi-beralih-tanam-kopi>(30 Oktober 2014: Pkl. 19.45)
- Dunn, William N, 1999, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Indiahono. Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media. Yogyakarta.
- Irawan. Prasetyo. 2003. *Pengembangan Sumber Daya Manusia* . STIA LAN Press. Jakarta.
- Dinas Perkebunan SulTeng. 2013. Produksi Kakao Digenjot Hingga 1 Juta Ton pada 2014. Melalui <<http://m.bisnis.com/industri/read/20131205/99/190710/produksi-kakao-digenjot-hingga-1-juta-ton-pada-2014>> (10/09/2014)
- Juknis . 2014. Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu (GERNAS) Kakao Di Kabupaten Sigi. Dinas Perkebunan Kab.Sigi.
- Nawawi, Hadari. 2006. *Evaluasi dan Manajemen Kinerja di Lingkungan Perusahaan dan Industri*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif (Dalam Perspektif Rancangan Penelitian)*. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta.
- Rakhmat. 2009. *Teori Administrasi dan Manajemen Publik*. Pustaka Arif. Jakarta.
- Rusli, Budiman. 2013. *Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*, Hakim Publishing . Bandung
- Satori dan Komariah. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Silalahi. Urbar. 2009. *Metode Penelitian Sosial*, Rafika Aditama. Bandung.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alpha Betha. Bandung.
- Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alpha Betha. Bandung.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. CV. Alfabeta. Bandung
- Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 1643/Kpts/OT.160/12/2008 tanggal 2 Desember 2008 tentang Penyelenggaraan dan Pembentukan Tim Koordinasi Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao.
- Wahab. S.A. 2001. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Universitas Negeri Malang. Malang.
- Wahab. S.A.. 2012. *Analisis Kebijakan ; dari Formulasi Ke Penyusunan Model – Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Wibawa. Samudra.1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Rajawali Press. Jakarta.